



**EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM KERANGKA
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA**

*(The Existence Of Traditional Justice Within The Framework
Special Autonomy Of Papua Province)*

TESIS

*Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

**ONIAS WENDA
NIM. 2022025015002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM KERANGKA
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA**
*(The Existence Of Traditional Justice Within The Framework
Special Autonomy Of Papua Province)*

Diajukan Oleh :

**ONIAS WENDA
NIM. 2022025015002**

Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

**Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19600713 198903 1 002**

Dosen Pembimbing II

**Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.
NIP. 19591207 198803 1 001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : Onias Wenda

NIM : 2022025015002

Judul Tesis : Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kerangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

**ONIAS WENDA
NIM. 2022025015002**

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji
Pada Tanggal, 20 Juni 2024

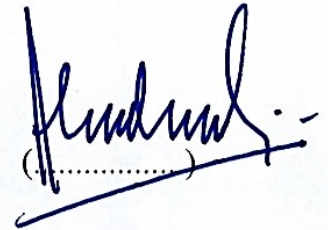
TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19600713 198903 1 002



(.....)

Sekretaris/Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.
NIP. 19591207 198803 1 001



(.....)

Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.
NIP. 19600127 198902 1 001



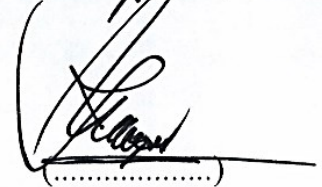
(.....)

Anggota : Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19660302 1993 1 002



(.....)

Anggota : Johan Rongngalaha, S.H., M.Hum.
NIP. 19600828 199003 1 001



(.....)

ABSTRAK

Onias Wenda. “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kerangka Otonomi Khusus Provinsi Papua”, dibimbing oleh **Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H**, sebagai pembimbing I dan **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.** sebagai pembimbing II.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan peradilan adat dalam UU Otonomi Khusus Papua, Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan pengadilan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sedangkan tugas dan wewenang peradilan dalam implementasi UU Otonomi Khusus Papua, Peradilan adat merupakan pengadilan yang hidup dalam praktek sehari-hari di kampung adat (masyarakat hukum adat), kelembagaan peradilan adat adalah bagian dari kelembagaan tradisional desa adat yang dalam definisi hukum disebut dengan “susunan asli”. Susunan asli sendiri dalam penjelasan dalam Pasal 103 huruf a adalah sistem organisasi kehidupan desa adat yang dikenal di wilayah-wilayah masing-masing, maka kelembagaan pengadilan desa adat adalah pengadilan adat yang dikenal oleh masyarakat hukum adat, baik yang berfungsi memutus, maupun yang berfungsi mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat. Peradilan adat mempunyai kompetensi absolut dan relatif sebagai sebuah lembaga peradilan yang dikenal oleh masyarakat hukum adat. Tidak menutup kemungkinan juga dapat bersinggungan dengan pihak-pihak, atau kepentingan-kepentingan diluar masyarakat adat, yang berkaitan dengan “adat” desa atau daerah setempat. Secara spesifik tugas dan wewenang peradilan adat dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

Kata Kunci : *Peradilan Adat, Otonomi Khusus Provinsi Papua.*

ABSTRACT

Onias Wenda. " The Existence Of Traditional Justice Within The Framework Special Autonomy Of Papua Province ", supervised by Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, as supervisor I and Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A. as supervisor II.

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction, data presentation and verification (conclusion).

The research results show that recognition and protection of customary justice in the Papua Special Autonomy Law, the granting of Special Autonomy to the Papua Province is intended to realize justice, uphold the supremacy of law, respect for Human Rights (HAM), accelerate economic development, increase the welfare and progress of the Papuan people, in the context of equality and balance with the progress of other provinces. One of the special features of autonomy for Papua Province is the implementation of customary courts as stated in Article 50 paragraph (2) and Article 51 paragraph (1) to paragraph (8) of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province, in fact The lives of indigenous communities in Papua still continue to enforce, defend and submit to their respective customary courts, especially in resolving customary cases that occur between members of the customary law community. This fact is further strengthened by the regulations in Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province. Meanwhile, the duties and authorities of the judiciary in implementing the Papua Special Autonomy Law, customary courts are courts that live in daily practice in traditional villages (customary law communities), traditional justice institutions are part of traditional traditional village institutions which in the legal definition are called "original arrangements". The original structure itself in the explanation in Article 103 letter a is a traditional village life organization system that is known in each region, so the institution of a traditional village court is a customary court that is known to the customary law community, both with the function of deciding, and with the function of reconciling customary disputes based on customary law. Customary courts have absolute and relative competence as a judicial institution known to the customary law community. It is also possible that it could come into contact with parties or interests outside the traditional community, which are related to the "customs" of the village or local area. Specifically, the duties and authority of customary courts can be seen in the Special Regional Regulations of Papua Province Number 20 of 2008 in Article 6 and Article 8.

Keywords: Customary Court, Special Autonomy for Papua Province.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu: Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang”.

(Amsal 24:14)

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua nikmat yang telah di berikan.
2. Ayahandaku (alm.) dan Ibundaku tercinta atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas sejak kecil hingga dewasa yang tidak akan pernah saya balas sampai kapanpun.
3. Isteriku Sargen Veronica Hanasbey, yang tak-henti-hentinya memberikan semangat, dan berdoa agar penulis dapat menyelesaikan studi pada jenjang sekarang.
4. Saudara-saudaraku suku besar suku Ianni (Weyanda) Wilayah adat La-Pago, Papua Pegunungan atas dukungan dan doa.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan yang selalu mendidik dan memberikan dukungan serta nasihat.
6. Almamaterku Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Tanah terjanji, Tanahku Papua dimana aku dilahirkan dan dibesarkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas curahan kasih, rahmat dan karuniaNya, sehingga Tesis ini dapat disusun dan dirampungkan, kendati masih terdapat berbagai kurang sempurnaan dari aspek substansi, struktur maupun ragamnya. Rampungnya Tesis ini bukan hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu adalah lumrah melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E.,M.Sc.Agr., Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Pembimbing I, atas segala kebijakannya telah menerima dan memperkenankan penulis belajar dan menimba ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A, sebagai Pembimbing II, awal penyusunan Tesis ini, dalam kesibukan akademiknya masih meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sampai Tesis ini dapat dirampungkan sesuai jadwal akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, antara lain: Prof. Dr. Melkias Hetaria, S.H.,M.Hum, Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum., Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., Dr. Marthinus Solossa, S.H., M.Hum., Dr. William Reba,

S.H., M.Hum., Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., Dr. Lily Bauw, S.H., M.Hum., Dr. Supriyanto Hadi., S.H., M.Hum., Dr. Budiyanto, S.H., M.H., Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum., Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum., Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H., Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H., Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.Hum., Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.Hum., Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., Dr. Yusak E. Reba, S.H., M.H., Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H., Dr. Karel V.H Baransano, S.H., M.H., Rehabeam Mofu, S.H., M.H., Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., Johan Ronggalaha, S.H., M.Hum., Victor Th. Manengkey, S.H., M.H.

6. Bapak dan Ibu serta Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dorongan moril dan semangat kepada penulis hingga rampungnya penulisan Tesis ini.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai harapan Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Jayapura, Juni 2024

Salam Hormat

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
PELAKSANAAN UJIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTARCT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Lokasi Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Populasi dan Sampel	20
5. Jenis dan Sumber Data	20
6. Teknik Prosedur Pengumpulan Data	21
7. Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Adat dan Hukum Adat	23
B. Konsep Peradilan Adat	25
C. Peradilan Adat dan Masyarakat Adat Papua	27
D. Kedudukan Peradilan Adat Dalam Konstitusi	33
E. Kebijakan Otonomi Khusus Aceh dan Papua	36
F. Landasan Teori Dan Kerangka Pikir	42
1. Teori Negara Hukum	42
2. Teori <i>The Living Law</i>	51
3. Teori Keputusan (<i>Beslissingenleer</i>) Ter Haar	56
4. Teori Politik Hukum	60
5. Kerangka Pikir	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengakuan dan Perlindungan Peradilan Adat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	72

B. Tugas dan Wewenang Peradilan Adat dalam menjalankan Fungsi Kehakiman Bagi masyarakat adat Papua Di Provinsi Papua	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117